

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(DEP. KESEHATAN, DEP. TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BKKBN,
BADAN POM, ASKES, JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN DJSN)**

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: II
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Eselon I Depnakertrans RI
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 14 Januari 2010
Waktu	: Pukul 09.00 WIB - selesai
Ketua Rapat	Dr. Sumarjati Arjoso, SKM/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabağ. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara	: 1. Paparan Eselon I Depnakertrans RI tentang Tupoksi. 2. Realisasi Anggaran Tahun 2009. 3. Program Kerja Tahun 2010
Jumlah kehadiran	: Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, orang Ijin,

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dibuka pukul 09.30 WIB dan setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tertib Pasal 245 ayat (1) rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Sekjen Kemnakertrans RI mewakili para Eselon I Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI menyampaikan kata pengantar berkaitan pagu anggaran Eselon I Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara keseluruhan (9 Eselon I). Total pagu untuk tahun 2009 sebesar Rp. 3,2 Milyar dan pagu untuk tahun 2010 sebesar Rp. 2,8 Trilyun. Sedangkan alokasi anggaran berdasarkan program dibagi dalam 11 program.

1. PAPARAN DIRJEN PHI DAN JAMSOS

1. Tugas pokok Ditjen PHI dan Jamsos adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan tenaga kerja.
2. Fungsi Ditjen PHI dan Jamsos terdiri dari :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi syarat kerja, kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi syarat kerja, kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 - c. Penyusunan standar, norma, pedoman, criteria, prosedur dan evaluasi di bidang pembinaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi syarat kerja, kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi syarat kerja, kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
3. Capaian Renstra Ditjen PHI dan Jamsos adalah 12.068 LKS Bipartit dari target Renstra sebesar 13.000 LKS Bipartit.
 4. Realisasi penyerapan APBN Tahun 2009 menurut pusat dan daerah sampai dengan Desember 2009.

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI KEUANGAN	%	REALISASI FISIK
1	Pusat	Rp.56.018.595.000	Rp.49.988.976.716	89,24	93,29
2	Daerah	Rp.29.214.695.000	Rp.24.919.231.837	86,54	88,23
	Jumlah	Rp.85.233.290.000	Rp.74.908.208.553	87,89	90,76

5. Capaian realisasi anggaran daerah adalah provinsi tertinggi Kalimantan Barat 97,21%, provinsi Riau 97,06% dan provinsi Sulawesi Utara 94,78%. Sedangkan kab/kota tertinggi adalah Kota Manado 97,06%, Kab. Garut 96,43% dan Bengkulu Utara 95,7%.
6. Alokasi anggaran 2010 untuk Satker Pusat pagunya sebesar Rp. 79.653.290.000,-, Satker Daerah pagunya sebesar Rp. 41.700.000.260,- sehingga total pagu menjadi Rp. 121.353.290.260,-
7. Sedangkan rencana kegiatan tahun 2010 meliputi :
 - a. Peningkatan kapasitas SDM sebesar Rp. 18,3 Milyar.
 - b. Penguatan Kelembagaan sebesar Rp. 15,5 Milyar.
 - c. Pengembangan penyusunan program sebesar Rp. 9,2 Milyar.
 - d. Bansos sebesar Rp. 4,36 Milyar.
 - e. Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial sebesar Rp. 9 Milyar.
 - f. Pengembangan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 30 Milyar.
8. Program prioritas nasional RPJMN 2010-2014 adalah penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan pusat dan daerah serta penguatan kelembagaan hubungan industrial.
Sedangkan prioritas bidang Ditjen PHI dan Jamsos meliputi Rencana Kerja dan Pemerintah terdiri dari :
 - a. Pemberian dorongan dan penyempurnaan pelaksanaan negosiasi Bipartit antara pekerja dan pemberi kerja.
 - b. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Prioritas bidang terdiri dari :

- a. Pembinaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi.

- b. Pembinaan kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial.
 - c. Pembinaan pengupahan dan jaminan sosial.
9. Kegiatan dekonsentrasi tahun 2010 meliputi :
- a. Sosialisasi pembentukan LKS Bipartit.
 - b. Sosialisasi Pembentukan PP/PKB
 - c. Pemilihan LKS Bipartit terbaik/Bipartit Awards
 - d. Survey nilai KHL dan Penetapan.
 - e. Pencegahan dan penanganan kasus.
 - f. Bimtek tata cara pembentukan dan pemberdayaan LKS Bipartit.
 - g. Sosialisasi penyelesaian HI diluar pengadilan hubungan industrial.
 - h. Pemutakhiran data HI dan Jamsos.
10. Komisi IX menyangkan terjadinya penurunan anggaran Kemnakertrans Tahun 2010 dari Rp. 3,2 Trilyun menjadi Rp. 2,8 Trilyun, apalagi penurunan terbesar terjadi pada anggaran kegiatan peningkatan kualitas SDM tenaga kerja.
11. Berkaitan dengan besarnya Angkatan kerja, perlu upaya peningkatan kualitas berbagai program Kemnakertrans agar para Tenaga Kerja Indonesia dapat bersaing dengan Tenaga Kerja Asing yang akan masuk ke Indonesia seiring dengan berlakunya zona perdagangan bebas Indonesia/Asean – China.
12. Kurangnya pengawasan merupakan salah satu sebab penyelesaian masalah ketenagakerjaan tidak efektif. Oleh karena itu perlu upaya peningkatan kualitas (*up grading*) para tenaga pengawas di seluruh Indonesia melalui pelatihan.
13. Diusulkan agar sistem pengupahan nasional lebih diperbaiki untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, untuk itu perlu dilakukan survey di lapangan mengenai upah minimum di setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
14. Berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan (masalah upah minimum, outsourcing, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pemutusan hubungan kerja (PHK), dll) maka disarankan agar Kemnakertrans khususnya Ditjen PHI dan Jamsos melakukan pembahasan secara khusus yang lebih serius dengan Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI.
15. Kemnakertrans diharapkan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang menimpa 50 KK Transmigran yang berasal dari Kab. Palalawan Kepri.
16. Kemnakertrans diharapkan segera melakukan perubahan *mindset* melalui keberpihakan yang nyata kepada para pekerja, sehingga tidak timbul anggapan dikalangan masyarakat bahwa Kemnakertrans adalah kementerian yang berpihak kepada pengusaha.
17. Mendesak Kemnakertrans untuk menyelesaikan proses penyelesaian perkara yang menimpa buruh di Angkasa Pura I serta diharapkan tetap memegang teguh komitmen dalam membela hak-hak pekerja. Juga diharapkan dapat menindaklanjuti kasus yang menimpa Mantan pekerja PT. Trakindo Papua yang telah di PHK secara sepihak. PT. Trakindo juga diduga telah melakukan kejahatan dengan menyangkan biodata para pekerja yang di PHK dalam website, yang menyebabkan mantan karyawan PT. Trakindo tersebut tidak dapat bekerja di berbagai perusahaan lain.
18. Kemnakertrans perlu menindaklanjuti adanya kasus yang menimpa 132 pegawai hotel Grand Aquila Bandung yang diberhentikan hanya dikarenakan para pekerja membuat serikat pekerja.
19. Komisi IX DPR RI perlu diberikan informasi terhadap berbagai kendala dan permasalahan yang ada dalam lingkup internal Kemenakertrans dalam melaksanakan berbagai program kerjanya, sehingga Komisi IX DPR RI dapat mengetahui secara lebih mendalam berbagai

permasalahan dan kendala dari berbagai sisi secara lebih komprehensif dan tidak hanya soal-soal yang berkenaan dengan kekurangan anggaran saja, guna ikut membantu dalam mencari pemecahannya.

20. Penetapan upah minimum merupakan wewenang setiap Kepala Daerah, oleh karena itu perlu disosialisasikan kepada Kepala Daerah agar dalam menetapkan upah minimum tidak terlalu jauh perbedaannya dengan kebutuhan hidup layak (KHL).

2. PAPARAN DIRJEN P4TRANS

1. Tugas Ditjen P4Trans adalah melaksanakan pembinaan kawasan transmigrasi.

2. Fungsi Ditjen P4Trans meliputi :

- a. Perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi dan penempatan transmigran.
- b. Penyediaan dan pelayanan pertanahan.
- c. Pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi.
- d. Fasilitas perpindahan dan penempatan transmigran dan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi.
- e. penyelenggaraan administrasi Ditjen P4Trans.

3. Kinerja Ditjen P4-Trans tahun 2009 meliputi :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana perwakilan bagi masyarakat miskin pada 69 kawasan yang mencakup 91 lokasi.
- b. Fasilitas perpindahan transmigran 8830 keluarga (35.220) terintegrasi dengan penataan penduduk setempat 26.415 keluarga.
- c. Pembangunan sarana dan prasarana kawasan perkotaan baru dengan skema KTM 12 kawasan.
- d. Memfasilitasi pengembangan investasi komoditas kelapa sawit, jagung, coklat dan tebu di kawasan transmigrasi oleh 21 badan usaha dengan rencana investasi Rp. 1,9 Trilyun.

4. Realisasi fisik dan keuangan tahun 2009 antara lain dari pagu sebesar Rp. 696.697.464.000,- terealisasi tahun 2009 sebesar Rp. 624.014.329.000,- (89,57%) dibandingkan dengan prediksi 91,69%. Sedangkan realisasi tahun 2008 mencapai 86,86%.

5. Dukungan anggaran Ditjen P4Trans Tahun 2010 sebesar Rp. 646.861.128.000,- terdiri dari anggaran untuk daerah sebesar Rp. 532.414.537.000,- (82,31%) dan anggaran untuk pusat sebesar Rp. 114.446.591.000,- (17,69%).

6. Ditjen P4 Trans Kemnakertrans mengajukan usulan APBNP sebesar Rp. 184.941.160.000,-.

7. Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) perlu dipercepat terutama di wilayah-wilayah perbatasan serta perlu upaya yang lebih keras dalam rangka peningkatan SDM di daerah.

8. Penjelasan dan evaluasi dari Dirjen P4Trans berkaitan dengan progres serta perkembangan pembangunan transmigrasi selama ini agar pembangunan di daerah transmigrasi juga diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana penunjang, misalnya Rumah Sakit/Puskesmas, jalan, dan fasilitas umum serta fasilitas social lainnya.

9. Diusulkan agar Kemnakertrans mengajukan program/proyek yang sifatnya *multy years*, seperti kementerian lainnya, sehingga program/proyeknya tidak tertunda-tunda oleh karena harus mengajukan usulan anggaran setiap tahunnya.

10. Masalah kejelasan tanah di lokasi transmigrasi yang bersifat *clean and clear* perlu menjadi perhatian pemerintah, agar tidak terjadi masalah bagi para transmigran di kemudian hari setelah mereka menempati lokasi transmigrasi.

11. Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) merupakan program yang sifatnya lintas sektoral, oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi antar departemen yang terkait. Dengan masih adanya permasalahan tanah di lokasi KTM, ini menandakan masih kurangnya koordinasi. Diusulkan agar dibentuk Panja untuk membahas permasalahan-permasalahan dalam pembangunan KTM.
12. Anggaran yang diperlukan untuk pemeliharaan dan kelanjutan program KTM kepada daerah dinilai sangat memberatkan. Oleh karena itu perlu kejelasan mengenai tanggung jawab anggaran KTM apakah tanggung jawab pusat atau daerah.

3. PAPARAN DIRJEN P2MKT

1. Tugas Ditjen P2MKT adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
2. Fungsi Ditjen P2MKT adalah :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan.
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan.
 - c. Penyusunan standard, norma, pedoman, criteria dan prosedur.
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
 - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal di bidang pembinaan perencanaan teknis, pengembangan masyarakat dan kawasan, peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana kawasan, dan penyerasian lingkungan.
3. Realisasi fisik dan keuangan Ditjen P2MKT s/d Desember 2009, dari pagu DIPA sebesar Rp. 535.938.184.000,- realisasi fisik sebesar 93,17%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 493.749.608.307,- (92,13%).
4. Permasalahan penyerapan anggaran Ditjen PM2MKT Tahun 2009 meliputi :
 - a. Adanya alokasi transito dalam kegiatan pemerintahan Kepemimpinan yang baik di Ditjen P2MKT (gaji pegawai) sebesar Rp. 2.841.170.000,-.
 - b. Adanya pergantian pejabat pengelola keuangan Satker-satker daerah yang terjadi pada bulan Agustus-September yang menghambat penggunaan anggaran.
 - c. Hambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa di daerah karena terbatasnya personil yang memiliki sertifikasi, sehingga memanfaatkan unit pelayanan pengadaan barang dan jasa di Pemda yang juga overload dalam proses pengadaan barang dan jasa.
 - d. Adanya penempatan transmigrasi yang ditunda sehingga paket-paket pembinaan tidak dapat dimanfaatkan (Jadup beras dan non beras serta sarana produksi pertanian/paket A.)
 - e. Adanya sisa-sisa tender pada pekerjaan kontraktual yang tidak dapat dioptimalkan melalui revisi DIPA karena keterbatasan alokasi jadwal yang telah ditentukan oleh Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan.
5. Kebutuhan dan alokasi anggaran Ditjen P2MKT berdasarkan kegiatan prioritas tahun 2010 sebesar Rp. 762.879.674.000,- dengan ketersediaan dana sebesar Rp. 584.174.225.000,- dan kekurangan anggaran tahun 2010 sebesar Rp. 178.705.449.000,- yang juga merupakan kebutuhan prioritas Ditjen P2MKT telah diusulkan kepada Menakertrans pada tanggal 7 Januari 2010.
6. Mengusulkan adanya rapat antara Dirjen P2MKT dan Komisi IX DPR RI untuk membahas permasalahan-permasalahan dalam pembinaan transmigrasi.
7. Komisi IX akan membantu proses hibah dari Ditjen P2MKT kepada pemerintah daerah, namun harus dilihat dari sisi hukum dan mekanismenya. Karena masalah hibah merupakan domain pemerintah, oleh karena itu diusulkan agar pemerintah/Kemnakertrans membuat Peraturan Pemerintah untuk mempermudah proses hibah tersebut.

8. Keberhasilan pemukiman transmigrasi tergantung pemilihan lokasi dan perencanaan yang tepat. Perlu upaya pemerintah agar pemukiman transmigrasi tidak terlalu jauh untuk menghindari pembangunan infrastruktur yang menelan biaya besar.
9. Mengingat adanya dampak sosial politik dalam pembangunan KTM apalagi banyak dibuka di daerah pedalaman dan daerah perbatasan, maka diusulkan agar program KTM juga melibatkan unsur TNI dan BIN.

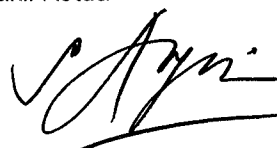
III. KESIMPULAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Eselon I Kemnakertrans (Dirjen PHI dan Jamsos, Dirjen P4 Trans dan Dirjen P2MKT) pada hari ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi IX DPR RI akan segera melakukan Rapat Dengar Pendapat untuk pendalaman/diskusi intensif dengan Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membahas langkah-langkah kongkrit dalam menyelesaikan permasalahan kasus-kasus ketenagakerjaan yang terkait dengan UU Nomor 13 Tahun 2003, terutama masalah outsourcing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sudah berlarut-larut.
2. Komisi IX DPR RI akan segera membentuk Panja Ketransmigrasian yang diantaranya membahas masalah Kota Terpadu Mandiri (KTM).

Rapat diakhiri pukul 22.00 WIB.

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua



dr. SUMARJATI ARJOSO, SKM